

ANALISIS PELAPORAN KEUANGAN MELALUI SIPD / AKLAP DALAM UPAYA PERCEPATAN PERENCANAAN DAN BELANJA PADA PUSKESMAS SILO I KABUPATEN JEMBER

Soembang Legianto
embanglegian@gmail.com
Universitas PGRI Argopuro Jember

Abstrak

Uji coba untuk sistem penerapan SIPD / AKLAP dilakukan pada pertengahan tahun 2022 dan dilaksanakan pada tahun 2023, di mana Puskesmas Silo I sebagai OPD daerah kabupaten Jember telah mendapat status BLUD dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan laporan SIPD dan AKLAP. Laporan keuangan yang berbasis web pada SIPD dan AKLAP berpotensi untuk meningkatkan mutu serta perkembangan layanan kesehatan bagi Masyarakat di wilayah sekitar. Sedangkan Kualitas layanan kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh kesejahteraan para petugas Kesehatan di OPD Puskesmas Silo I. Ketepatan waktu serta kelancaran dalam pembayaran gaji untuk non-ASN berkontribusi sangat besar pada peningkatan kesejahteraan mereka, yang pada kontribusinya juga bermanfaat untuk meningkatkan mutu layanan di Puskesmas Silo I. Penelitian ini bertujuan untuk mengenali faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat sistim perencanaan dan belanja di Puskesmas Silo I, hal tersebut dapat kami lakukan dengan menganalisis penyerapan anggaran yaitu Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Analisa pada Realisasi Belanja bulanan dan tahunan, yang meliputi pagu belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan pagu modal. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan saran dan solusi untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi ketepatan dalam mempercepat pencapaian target penyerapan anggaran Puskesmas Silo I, serta tidak menyepelkan tenaga-tenaga Kesehatan baik itu tenaga ASN maupun tenaga non-ASN dalam bidang peberiaan gaji yang tepat waktu, sehingga pengelolaan dan perencanaan anggaran di masa mendatang tidak menimbulkan isu – isu negative bagi kelancaran Perencanaan, dan dapat menunjang perubahan dalam kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Jember bahkan hingga mencapai tingkat pemerintah pusat.

Kata Kunci: SIPD / AKLAP, Percepatan, Perencanaan, Perubahan, Kualitas, Gaji Non-ASN.

PENDAHULUAN

Teori Sistem Akuntansi Publik Di mana akuntansi diterapkan dalam domain publik untuk menyajikan data keuangan yang relevan dan dapat dipercaya bagi para pengambil keputusan, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip, konsep, serta metode akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk prinsip akuntabilitas yang menyoroti pentingnya tanggung jawab pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan publik, dan prinsip transparansi yang menekankan nilai keterbukaan serta kejelasan dalam pengelolaan keuangan publik (Munawir, 2005).

Teori Sistem Informasi Manajemen Keuangan (SIMKEU) menyatakan bahwa fokus Manajemen Keuangan adalah pada pengelolaan dan pengendalian aspek keuangan (Brigham dan Houston, 2019).

1. Belanja Barang dan Jasa berdasarkan pendapat seorang pakar dalam akuntansi dan manajemen keuangan publik di Indonesia, yang dikenal akan kontribusinya terhadap pengembangan praktik dan teori akuntansi sektor publik di negara ini, mencakup

pembelian barang seperti alat tulis, bahan pangan, serta layanan konsultasi (Mardiasmo, 2009).

2. Belanja Barang: Contoh pembelian bahan habis pakai, elektronik, atau perabotan rumah tangga kantor.
3. Belanja Jasa: Contoh belanja jasa adalah Pembayaran gaji dan jasa pelayanan Kesehatan bagi non ASN, Pembayaran tagihan listrik, telepon, air, Pembayaran Jasa pelayanan.

Belanja jasa lainnya : contoh Belanja jasa penyelenggara acara / Even organizer

Rencana Anggaran Belanja untuk SIPD/AKLAP di Puskesmas Silo I dimulai pada tahun 2023 dengan pendekatan percobaan transisi dari sistem pelaporan terpadu menuju laporan BLUD. Masih ada banyak kesalahan ditemukan dalam kode rekening untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal yang mengakibatkan adanya kesalahan perencanaan dalam penganggaran di SIPD / AKLAP. Pada tahun 2024, laporan keuangan SIPD/AKLAP akan genap satu tahun, dan dalam penerapannya, telah tersedia pembaruan laporan yang lebih ketat dengan format jurnal umum yang lebih rinci. Selain itu, terdapat juga pembaruan terkait usulan rencana anggaran untuk tahun 2025 yang harus menjadi lebih teliti sesuai dengan RKBMD puskesmas tahun 2024 yang harus diinput ke dalam SIPD/AKLAP. Selama penggunaan dan pembaruan SIPD/AKLAP tahun 2023, sering kali terjadi keterlambatan dalam pembayaran gaji bagi tenaga non-ASN yang mengakibatkan keluhan serta menimbulkan isu terkait kesejahteraan mereka yang terabaikan, dan situasi ini bisa berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan untuk masyarakat di Puskesmas Silo I. Munculnya masalah terkait keterlambatan pembayaran gaji bagi tenaga non-ASN di Puskesmas Silo I Kabupaten Jember telah menarik perhatian dan menjadi isu yang sangat mendesak bagi kami untuk dilakukan research penelitian. Oleh karena itu, penelitian perlu dilakukan untuk membantu mencari solusi terkait permasalahan ini.

Gaji pegawai non ASN, menurut Peraturan Menteri PAN RB No. 15, (2019) tentang manajemen pegawai non ASN, menyatakan bahwa Puskesmas BLUD memberikan gaji dasar kepada pegawai non ASN berdasarkan take home pay. Sejak beralih menjadi BLUD, gaji pegawai non ASN disesuaikan dengan total minimal take home pay untuk jenis pekerja non-ASN. Dalam pelaksanaannya pembayaran pegawai non ASN bersumber dari dana BLUD yang ada di Rekening Belanja Barang Jasa, yang sangat berkaitan erat dengan pelaporan SIPD / AKLAP, Proporsi anggaran BLUD Puskesmas mencakup Belanja Pegawai ASN / Belanja Barang Jasa / Belanja Modal yaitu 50% / 30% / 20%, dan pada belanja barang/jasa didalamnya yang terdapat belanja tenaga administrasi Kesehatan sangat bersaing ketat dengan kebutuhan operasional puskesmas. Pengeluaran operasional Belanja Barang Jasa bersatu dengan gaji pegawai non ASN puskesmas yang merupakan kewajiban rutin yang juga sama-sama perlu dipenuhi oleh puskesmas. Kebutuhan anggaran untuk Belanja Barang Jasa sering mengalami kekurangan dana. Jika anggaran tersebut telah habis, puskesmas harus menunggu perubahan RBA / PAPBD yang harus disetujui oleh DPRD. Tim perencanaan di puskesmas perlu lebih tepat dalam pengelolaan anggaran BLUD dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75, (2014), dan Peraturan Pemerintah No. 45, (2013) mengatur prosedur pengajuan proposal anggaran. Semua itu tercantum dalam DPA yang didasarkan pada pendapatan puskesmas selama satu tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, yang menjadi acuan dalam penganggaran pagu. Dengan demikian, pengeluaran kebutuhan puskesmas dalam satu tahun harus sesuai dengan pagu yang telah ditentukan dalam DPA. Namun, perubahan DPA dapat dilakukan melalui DPPA yang disesuaikan dengan pendapatan bersih yang tercatat pada Semester 1 dan 2, yang memungkinkan pergeseran

serta penambahan pagu anggaran pada kelompok kode rekening dalam usulan RAB (Rencana Anggaran Belanja).

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan dampak yang baik pada mutu layanan publik dan manajemen data serta informasi pada tingkat daerah, dan beberapa manfaat dari SIPD adalah Mempercepat dan merencanakan pengelolaan finansial serta informasi pemerintahan daerah, Meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab pemerintah daerah, Memperbesar akses dan penyediaan informasi untuk publik.

Riset ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), terutama dalam aspek Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP). Dengan memahami dinamika pelaksanaan SIPD, temuan dari studi ini juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah daerah serta meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kualitas pemerintahan daerah dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di Puskesmas Silo I.

METODE PENELITIAN

Analisa dalam penelitian ini yaitu mengkaji aspek pengelolaan dan penyerapan / Realisasi anggaran dalam laporan keuangan di Puskesmas Silo I, mengaplikasikan metode KUALITATIF dan melibatkan verifikasi dari pejabat-pejabat terkait, seperti KPA, PPK, dan PPTK. Pengumpulan dari SIPD/AKLAP, baik yang bersifat bulanan maupun tahunan di OPD Puskesmas Silo I Kabupaten Jember, dengan menganalisa penyerapan anggaran disepanjang tahun 2024 yang disertai konfirmasi pejabat-pejabat terkait, Dengan memanfaatkan teknik analisis, yaitu menganalisis tren belanja anggaran Puskesmas untuk tahun 2024. Proses ini meliputi analisis perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan belanja yang terealisasi, serta analisis rasio belanja Puskesmas Silo I dibandingkan total anggaran di tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Silo I, yang beralamat di jl. A. Yani no. 154, desa Sumberjati, kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, pada bulan Juli 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengindikasikan bahwa tahapan Penganggaran dan pelaporan keuangan di Puskesmas Silo I telah dilaksanakan dengan baik. KPA mengkonfirmasi bahwa peran dan tanggung jawab PPK dan PPTK, serta Bendahara Puskesmas Silo I sudah melaksanakan pelaporan yang sudah sesuai dan dengan tertib. Dalam konfirmasinya semua telah mengerti tentang prosedur pelaporan keuangan melalui SIPD / AKLAP, dan telah menyerahkan laporan keuangan dengan tepat waktu baik kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember maupun melalui SIPD / AKLAP Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Puskesmas Silo I menyatakan bahwa sistem pelaporan keuangan melalui SIPD / AKLAP berjalan tanpa hambatan. Namun, ada masalah eksternal yang muncul pada tahun 2024, yaitu tidak adanya pengesahan Anggaran Perubahan pada paruh kedua / semester ke 2 pada tahun 2024. PPK mengkonfirmasi bahwa terdapat informasi kekosongan anggota-anggota komisi di DPRD Jember diakibatkan adanya proses transformasi. Hal ini menyebabkan penerapan dan pengesahan Pergeseran Anggaran tidak dapat disahkan dan tidak memiliki landasan yang kuat dalam PAPBD. Dengan tidak adanya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) di tahun 2024 kemarin menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pembayaran gaji non-ASN yang menurut PPK adalah anggaran Belanja barang/jasa melampaui DPA awal.

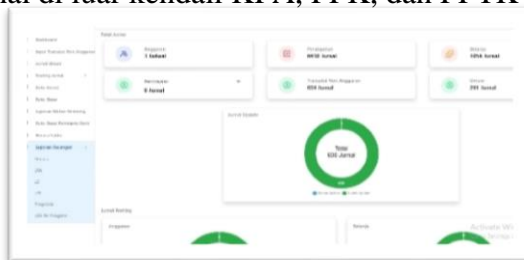
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Berdasarkan hasil komunikasi dan verifikasi dengan PPTK bahwa selama pelaksanaan kegiatan tersebut tidak ditemukan adanya kendala, dan dalam pelaksanaannya selalu berkomunikasi dengan PPK untuk melaporkan ke dalam laporan keuangan rutin yang tercantum dalam SIPD / AKLAP.

Mengacu pada pertanyaan yang telah dirumuskan serta permohonan informasi keuangan yang diberikan oleh PPK dan PPTK mengenai realisasi Belanja selama satu tahun, yaitu tahun 2024 adalah :

No.	Uraian	Anggaran Perkiraan	Realisasi	Lebih / Kurang	%
1	2	3	4	5= 3-4	6
1.	Pendapatan Puskesmas Silo I tahun 2024 yang disediakan dan tercantum dalam SIPD / AKLAP	1.776.773.043	2.322.667.721	- 545.894.678	76,50%
2.	Rencana Anggaran Belanja (RAB)	1.776.773.043	2.065.464.354	- 288.691.311	116,25%
3.	Laporan Realisasi / Penyerapan tahun 2024	1.776.773.043	2.065.464.354	- 288.691.311	116,25%
	Belanja Pegawai	1.029.000.000	1.028.902.665	97.335	99,99%
	Belanja Barang Jasa	533.031.900	979.306.689	- 446.274.789	183,72%
	Gaji non ASN	260.354.005	507.173.124	- 246.819.119	194,80%
	Belanja Modal	214.741.143	57.255.000	157.486.143	26,66%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran pada SIPD / AKLAP Puskesmas Silo I Tahun 2024.

Dari tabel yang ada, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan nyata Puskesmas Silo I untuk tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Anggaran Perkiraan. Ini menunjukkan bahwa Puskesmas Silo I memiliki pendapatan yang sangat memadai, yang berarti cukup untuk mendukung operasionalnya dalam rangka memenuhi status sebagai Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Status ini juga sangat dipengaruhi oleh dukungan eksternal, seperti dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Dalam analisis mengenai pengeluaran pegawai dan investasi, tidak terlihat ada kekurangan anggaran. Namun, untuk belanja barang dan jasa yang terkait dengan gaji non ASN, terdapat kekurangan anggaran yang memerlukan pergeseran anggaran, tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena belum ada pengesahan DPPA untuk tahun 2024. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa inilah yang menjadi alasan munculnya isu keterlambatan pembayaran gaji non ASN, yang merupakan faktor eksternal di luar kendali KPA, PPK, dan PPTK Puskesmas Silo I.



Gambar 1. Laporan Keuangan SIPD / AKLAP
 Sumber: SIPD / AKLAP Puskesmas Silo I tahun 2024

Menanggapi masalah keterlambatan pembayaran gaji non-ASN dan dengan Analisa yang telah dikumpulkan adalah disebabkan oleh kebijakan yang diluar wewenang KPA, PPK, dan PPTK tidak dapat melakukan realokasi serta pergeseran anggaran antara kode Rekening untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang/jasa, dan Modal pada semester kedua tahun 2024. Hal ini terjadi karena PAPBD 2024 belum disahkan oleh DPRD dan belum disetujui oleh bapak Bupati Jember. Pergeseran anggaran atau DPPA dalam rutinitasnya dan kebutuhannya biasanya dilaksanakan sebelum memasuki semester kedua untuk memprediksi kekurangan dana di masing-masing kode rekening, baik untuk belanja pegawai ASN, serta belanja barang/jasa dan belanja Modal. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran anggaran atau sisa anggaran tahun 2024 yang tidak terealisasi di semester kedua dapat dilakukan jika terdapat kebutuhan mendesak untuk belanja, namun harus memiliki dasar hukum untuk perubahan anggaran yang disebut DPPA, yang harus ditandatangani atau disetujui oleh Bupati dan diajukan oleh anggota komisi di DPRD.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran gaji bagi pegawai non ASN di Puskesmas Silo I bukan disebabkan oleh masalah internal Puskesmas, namun oleh faktor eksternal yang yaitu ketidakberadaan pengesahan PAPBD yang menjadi dasar untuk melakukan perubahan anggaran belanja Puskesmas pada semester kedua tahun 2024.

Penelitian ini pun menunjukkan bahwa fungsi tim perencanaan Puskesmas Silo I tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya bantuan dari pemerintah daerah. Untuk itu, diperlukan kerjasama yang sinergis antara OPD Puskesmas Silo I, Dinas Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan manajemen laporan keuangan yang efektif melalui SIPD/ AKLAP.

Dalam annalisa informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi Puskesmas Silo I lebih tinggi dibandingkan dengan Anggaran Perkiraan, sehingga menjadi tantangan dalam menyelaraskan total anggaran yang harus belanjakan atau direalisasikan. Seharusnya, Anggaran Perkiraan tidak jauh berbeda dari Pendapatan Riil atau Murni Puskesmas, sehingga Anggaran Perkiraan yang terdapat dalam SIPD atau AKLAP untuk Puskesmas Silo I dapat dioptimalkan untuk Pengeluaran Operasional dan pengeluaran belanja barang/ jasa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi tim perencanaan tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, sinergi sangat diperlukan guna menunjang pelaksanaan manajemen laporan keuangan yang baik. Sistem manajemen keuangan SIPD / AKLAP yang disediakan oleh pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses perencanaan dan pengeluaran Puskesmas.

PENUTUP

Dalam proses persiapan hingga pelaporan penelitian ini, Peneliti tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepala UPTD Puskesmas Silo I Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin tempat dan kesempatan untuk melakukan penelitian di lokasi jln. A.Yani no.154, desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.
2. Dosen pembimbing 1 dan 2 serta dosen Tamu di Universitas PGRI Argopuro Jember yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan pada proposal kami.
3. Teman mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember yang telah membantu dan memberikan sokongan informasi dalam setiap penulisan naskah dalam penelitian ini.
4. Para Peneliti sebelumnya tentang SIPD yang menjadi referensi dasar dalam penelitian ini.

Semoga saran dan solusi pada kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan tindak lanjut dan dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan perencanaan dan manajemen keuangan SIPD / AKLAP di daerah jember terutama pada OPD Puskesmas Silo I.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. *Akuntansiku*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.630>
- Deanita Andriana Putri, A., & Widyo Sasongko, R. (2023). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PELAPORAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MEWUJUDKAN SMART CITY (Studi Kasus di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur). 2(1), 11–21.
- Dian Handayani, Agus Lukman Hakim, & Jumanah. (2024). Efektivitas Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di PUSKESMAS Kaduhejo Kabupaten Pandeglang. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 133–151. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8635>
- Eki Rahmattuwloh, Acep Suherman, & Iqbal Noor. (2024). Analisis Kualitas Pelaporan Keuangan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Puskesmas Bantargadung. *Akuntansi* 45, 5(2), 371–381. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3360>
- Firmansyah, T. wahyudi. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. *Jumia*, 1–23.
- Gitarisdiana, C., Rasaili, W., & Andiriyanto, A. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep*, 10(1), 1–52.
- Khoirunisa, N., & Ahmad, A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 2(1), 82–91. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i1.3189>
- Malang, K. (2024). Assistance in producing financial reports at ampelgading health center, malang district. 5(1), 27–36.
- Meysi Vionika, A. (2024). Rancang Bangun Aplikasi Laporan Keuangan Pada Puskesmas Tanjung Raman Berbasis Web. 02(01), 192–197.
- Naida, N., & Sartika, D. (2025). Strategies to Overcome Challenges in Utilizing SIPD: Achieving High-Quality Accrual-Based Financial Reporting. *Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.55824/jpm.v4i1.479>
- Nugraha, F. A., & Agung Slamet Prasetyo. (2025). Analisis Sia Persediaan Pada Penyajian Laporan Keuangan Bpka Diy Tahun 2023. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 201–219. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.929>
- Puput Mia Ayuningtias, & Diah Hari Suryaningrum. (2024). Analisis Prosedur Audit Kas Setara Kas BLUD Puskesmas X Oleh KAP ENHA. *Akuntansi* 45, 5(2), 394–405. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i2.3362>
- Rahayu, A., Nurodin, I., & Sulaeman, S. (2023). Analysis of Accrual-Based Government Accounting Standards Application to The Financial Reports of Regional Public Service Agency (BLUD). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(2), 100–109. <https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27090>
- Rambe, M. T., & Devitra, J. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan BLUD Pada Puskesmas Kuala Tungkal I. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, 7(2), 184–195. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformasi/article/view/1239%0Ahttp://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformasi/article/download/1239/879>
- Sugesti, D., Handoko, V. R., & Sadono, T. P. (2025). Evaluation of the Local Government Information System (Sipd) in The Management of Bos Funds of the Berau Regency Education

- Office. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 4(7), 3611–3630. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i7.290>
- Tanan, C. I., Walilo, M., & Kenangalem, M. T. (2025). Peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Jayapura. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 8(1), 15–22. <https://doi.org/10.22225/wedj.8.1.2025.15-22>
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Tumija, Hendra, A., & Dkk. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah (Siagian , n . d .). Manusia telah mengembangkan peningkatan teknologi ya. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 79–91.
- Utami, M. N., Afriady, A., Polytechnic, B. S., & Regency, W. B. (2025). ANALYSIS OF SIPD IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY (BPKAD) OF CIMAHI CITY BASED ON HOME AFFAIRS MINISTERIAL. 17(1), 57–76. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v17i1.6617>
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64. <https://doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>